

**ANALISIS SEKTOR EKONOMI BASIS DAN PERANANNYA TERHADAP  
KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI RIAU TAHUN 2010 – 2017**

**Muhammad Habib Ridho<sup>1)</sup>, Wahyu Hamidi<sup>2)</sup>, Taryono<sup>2)</sup>**

1) Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : [muhammad.habibridho@student.unri.ac.id](mailto:muhammad.habibridho@student.unri.ac.id)

*Analysis of Base Economic Sector and its role in income inequality between  
districts / city in Riau Province, 2010-2017*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the basic economic sector and its role in income inequality between districts / cities in Riau Province. Then the secondary data used in this study for the period 2010 to 2017 sourced from BPS in Riau Province and analyzed by Location Quotient (LQ) and Wiliamson Index Sectoral. The results showed that based on LQ Analysis with the Income approach of districts / cities in Riau Province had 3 basic economic sectors, namely the Agriculture, Forestry, and Fisheries Sector, the Processing Industry Sector and the Services Sector. Then based on LQ Analysis with the labor approach of districts / cities in Riau Province only have 1 economic sector base, namely the Agriculture, Forestry and Fisheries Sector. Furthermore, the base sector that has average sectoral income inequality with a low category is the Agriculture Sector (0.25) and the Services Sector (0.26), and the average sectoral income inequality with the medium category is the Processing Industry Sector (0, 47).*

*Keywords: Base Economic Sector, Location Quotient, Inequality Sectoral Revenue, Sectoral Wiliams Index*

**PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berencana untuk mendapatkan kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya (Ghabil, 2005). Semua negara menginginkan adanya peningkatan standar hidup bagi rakyatnya, dengan cara mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki, kemudian menyusun rencana-rencana pembangunan dan

melaksanakannya demi menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pembangunan regional di Indonesia khususnya selama pelaksanaan Repelita lebih dimaksudkan sebagai pembangunan daerah (*Local Development*). Hal ini dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang bertujuan untuk (1) Memelihara keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah, (2) Memelihara keseimbangan ekonomi antar wilayah dan mencegah kesenjangan antar daerah, (3) Meningkatkan prakarsa daerah dan

peran serta masyarakat dalam pembangunan, (4) Memelihara keserasian pembangunan antara pusat-pusat kegiatan pembangunan di wilayah-wilayah perkotaan dan wilayah-wilayah pedesaan di sekitarnya (Ghalib, 2005).

Namun pada kenyataannya selama ini pembangunan hanya ditujukan untuk pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi, bukan peningkatan taraf hidup sebagian besar masyarakatnya. Artinya tingkat pertumbuhan yang tinggi tidak diimbangi dengan tingkat pemerataan distribusi hasil pembangunan. Pertumbuhan hanya terpusat pada daerah-daerah pusat pertumbuhan saja sehingga efek *trickle down* yang diharapkan tidak pernah tercapai. Hal ini yang menyebabkan permasalahan ketimpangan pendapatan antar daerah. Pengurusan sumberdaya alam dan mobilitas sumberdaya manusia terus terjadi mengalir dari wilayah pendukung (*hinterland*) ke pusat pertumbuhan ekonomi.

Masalah ketimpangan di Indonesia secara nyata dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi antara kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia ataupun ketimpangan ekonomi yang terjadi antara kota dengan desa. Secara umum persoalan pembangunan negara sedang berkembang tidak hanya menyangkut pencapaian tingkat pertumbuhan saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek distribusi dan pemerataan hasil pembangunan, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan proporsional, meliputi juga adanya

keseimbangan kemajuan antar wilayah.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional, salah satunya adalah ditetapkannya undang-undang Otonomi Daerah. Dimana undang-undang pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (sebagai revisi UU Nomor 32 tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 (sebagai revisi UU Nomor 25 tahun 1999) tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dengan ditetapkannya otonomi daerah diharapkan akan terjadi optimalisasi pembangunan di daerah. Sehingga setiap daerah harus mampu menggali potensi perekonomiannya dan penggalian potensi ekonomi (sektor ekonomi basis) tersebut diarahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Seperti yang diungkapkan Fifi (2013) bahwa untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, maka suatu daerah harus mengetahui sektor apa saja yang menjadi sektor basis di daerah tersebut.

Sebab, sektor ekonomi basis merupakan sektor – sektor yang paling mampu mempengaruhi keadaan perekonomian. Dimana berdasarkan teorinya, sektor basis tersebut merupakan sektor penggerak utama (*primer mover*) dalam perekonomian dan mampu mendorong sektor lainnya. Mengingat seperti yang diungkapkan Glasson (1978) dalam Priyarsono *et al* (2007) bahwa sektor ekonomi basis mampu mendorong sektor lainnya yang bukan basis (non basis). Selain itu Miranti *et al.*(2007) dalam

Baransano (2016) mengatakan bahwa penggalian sektor-sektor ekonomi basis di tiap wilayah sangat penting untuk mengatasi masalah ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah. Sehingga diharapkan dengan penggalian sektor ekonomi basis, mampu meningkatkan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah hingga juga mampu mewujudkan pembangunan ekonomi wilayah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pemerataan ketimpangan antar daerah.

Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi di Indonesia, yang merupakan Provinsi kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) pun tidak terlepas dari berbagai permasalahan dalam pembangunan ekonominya, termasuk ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota yang terjadi. Jika dilihat secara umum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Provinsi Riau pada tahun 2010 sampai 2017 cenderung mengalami stagnansi. Dimana PDRB per kapita Provinsi Riau pada tahun 2010 tercatat sebesar 70.16 juta Rupiah, kemudian pada tahun 2017 PDRB per kapita Provinsi Riau hanya menjadi 70,81 juta Rupiah. Stagnannya perolehan PDRB per kapita di Provinsi Riau tersebut dapat dilihat dengan jelas melalui Tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1**  
**PDRB Per Kapita ADHK Provinsi Riau tahun 2010-2017**  
**(Juta Rupiah)**

Tahun	PDRB Per Kapita	Pertumbuhan
2010	70.16	-
2011	71.64	2.10%
2012	72.40	1.06%
2013	72.30	-0.14%

2014	72.39	0.13%
2015	70.77	-2.24%
2016	70.60	-0.23%
2017	70.81	0.29%
Rata-rata	71.38	0.13%

Sumber : BPS, 2018

Disamping itu juga PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Riau belum sepenuhnya merata. Ada kabupaten/kota yang mampu memperoleh PDRB per kapita sangat tinggi, dan ada pula yang hanya mampu memperoleh PDRB per kapita sangat rendah dan jauh di bawah rata – rata. Dimana faktanya, rata-rata PDRB per kapita Kabupaten Bengkalis adalah 4 kali lipat dibandingkan rata-rata PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hulu. Dan juga masih banyak kabupaten/kota lainnya yang memiliki perolehan PDRB per kapita di bawah rata-rata Provinsi Riau. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas melalui Tabel 1.2 berikut ini.

**Tabel 2**  
**Rata – rata PDRB ADHK Per Kapita (dalam Juta Rupiah) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2017.**

Nomor	Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita
1	Kab. Bengkalis	153.1
2	Kab. Siak	118.47
3	Kab. Pelalawan	74.39
4	Kota Dumai	73.18
5	Kab. Rokan Hilir	69.24
6	Kab. Kepulauan Meranti	64.97
7	Kab. Kuanta Singingi	64.57
8	Kab. Indragiri Hulu	63.8
9	Kab. Kampar	58.22
10	Kota Pekanbaru	55.77
11	Kab. Indragiri Hilir	53.78
12	Kab. Rokan Hulu	35.33
<b>Rata-rata</b>		<b>73.73</b>

Sumber : BPS, 2018 (Diolah)

Dari Tabel 2 diatas terlihat bahwa masih terdapat perbedaan perolehan PDRB per kapita yang tinggi antar kabupaten/kota di Provinsi Riau. Maka dari itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan jalan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mampu menciptakan kemandirian perekonomiannya dan diberi kewenangan seluas – luasnya atas kebijakan terkait potensi yang dimilikinya, hingga diarahkan untuk mampu mewujudkan pembangunan ekonomi daerah. Maka, dibutuhkan penelitian untuk mengetahui potensi apa saja yang dimiliki kabupaten/kota di Provinsi Riau dan bagaimana perannya terhadap ketimpangan pendapatan sektoral antar kabupaten/kota yang terjadi di Provinsi Riau.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Sektor apa saja yang menjadi basis perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Riau? 2) Bagaimana Ketimpangan Pendapatan Sektor Ekonomi Basis antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau?

Tujuan dari Penelitian ini adalah : 1) Menganalisa sektor-sektor yang menjadi basis perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. 2) Menghitung besar Ketimpangan Pendapatan Sektor Ekonomi Basis antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

## **TELAAH PUSTAKA**

### **Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau

kemakmuran (income per- kapita) dalam jangka panjang (Subandi,2014 dalam Asih, 2015). Todaro (2006) mengungkapkan bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

### **Teori Basis Ekonomi**

Teori basis ekonomi di kemukakan oleh Richardson (1973) yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permin taan akan barang dan jasa dari luar daerah Berdasarkan teori basis ekonomi, perekonomian suatu wilayah dibagi menjadi dua, yaitu sektor basis dan sektor non basis.

Sektor basis adalah kegiatankegiatan yang mengekspor barang dan jasa keluar batas-batas pereko nomian wilayah yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan kegiatan-kegiatan yang menye diakan barang dan jasa untuk meme nuhi kebutuhan orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batasbatas perkonomian wilayah tersebut. Sektor non basis tidak mengekspor barang-barang. Ruang lingkup mere ka dan daerah pasar terutama adalah bersifat lokal.

Inti dari konsep ekonomi basis adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu daerah ditentukan oleh ekspor daerah tersebut. Ekspor itu sendiri tidak terbatas pada bentuk barang dan jasa, akan tetapi dapat

juga berupa pengeluaran orang asing yang berada didaerah tersebut terhadap barang-barang tidak bergerak. Budiharsono (2001).

### **Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah pada periode tertentu (Sjafrizal, 2014). Perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu (Sjafrizal, 2014) :

#### 1. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Pada pendekatan ini digunakan penjumlahan dari nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh daerah bersangkutan pada periode atau tahun tertentu, yaitu:

$$PDRB = \sum p_i q_i \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Dimana:

$p_i$  = Harga komoditi  $i$

$q_i$  = Jumlah produksi komoditi bersangkutan

#### 2. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada pendekatan ini merupakan penjumlahan dari nilai pengeluaran yang dilakukan pada daerah bersangkutan. Dengan formula sebagai berikut:

$$PDRB = \sum C_i + I_i + G_i + M_i \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Dimana:

$C$  = Konsumsi

$I$  = Investasi

$G$  = Pengeluaran pemerintah

$M$  = Impor

#### 3. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pada pendekatan ini Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

merupakan penjumlahan dari unsur-unsur pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, PDRB dapat dihitung dengan formula berikut :

$$PDRB = \sum s_i + w_i + r_i + \pi_i \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Dimana:

$s$  = Sewa

$w$  = Gaji dan upah

$r$  = Tingkat pengembalian modal atau tingkat bunga

$\pi$  = Keuntungan

### **Tenaga Kerja**

Menurut Badan Pusat Statistik, Tenaga Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Dalam Undang-Undang yang baru tentang ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja juga memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja tersebut telah menyempurnakan pengertian tentang tenaga kerja dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan.

### **Penyerapan Tenaga Kerja**

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya

suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja (Todaro, 2003). Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya pertumbuhan penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Kuncoro, 2002).

## METODE PENELITIAN

Objek dari Penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Adapun data time series yang telah ditentukan adalah tahun 2010 – 2017. Kemudian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang berasal dari BPS dan bersifat kuantitatif. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *expost facto*. Nugraha (2013) mengungkapkan bahwa metode *expost de facto* merupakan metode dimana menggunakan data masa lampau yang sudah ada tanpa memberi perlakuan maupun treatment khusus pada variabel yang diteliti.

Untuk menghindari terlalu luasnya ruang lingkup pembahasan serta tercapainya suatu hasil pembahasan yang lebih rinci dan terarah maka perlu ditegaskan bahwa penulis akan membahas sektor ekonomi basis dan ketimpangan pendapatan sektor basis antar kabupaten/kota.

## Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis deskriptif kuantitatif dengan alat analisis Location Quotient (LQ) dan Analisis Ketimpangan Pendapatan Sektor basis dengan Indeks Wiliamson Sektoral. Kedua alat analisis ini digunakan untuk melihat basis ekonomi yang sesuai dengan objek penelitian dan Ketimpangan Pendapatan per Sektor Basisnya.

LQ adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri disuatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional. Ada banyak variabel yang bisa diperbandingkan, tetapi yang umum adalah nilai tambah (tingkat pendapatan). Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$LQ = \frac{Vi/Vt}{Yi/Yt}$$

dimana :

$V_i$  = Nilai PDRB sektor  $i$  pada tingkat wilayah yang lebih rendah

$V_t$  = Total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah

$Y_i$  = Nilai PDRB sektor  $i$  pada tingkat wilayah yang lebih atas

$Y_t$  = Total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih atas

Dan untuk mendapatkan Nilai LQ rata-rata, maka digunakan rumusan sebagai berikut :

1) Rata-rata LQ Kabupaten/Kota

$$\overline{LQ}_k = \frac{LQ_1 + LQ_2 + LQ_3 + \dots + LQ_i}{n}$$

dimana :

$\overline{LQ}_k$  = LQ rata-rata Kabupaten/Kota

$LQ_i$  = LQ Kabupaten/Kota tahun  $i$

- $n$  = Banyak tahun  
 2) Rata-rata LQ seluruh Kabupaten/Kota

$$\overline{LQ}_{sk} = \frac{\overline{LQ}_{k1} + \overline{LQ}_{k2} + \overline{LQ}_{k3} \dots + \overline{LQ}_{ki}}{n_k}$$

dimana :

$\overline{LQ}_{sk}$  = Rata-rata LQ seluruh Kabupaten/kota

$\overline{LQ}_{ki}$  = Rata-rata LQ kabupaten/kota i

$n_k$  = Banyak Kabupaten/Kota

Selanjutnya, kriteria pengukuran ada tiga kemungkinan yang terjadi yaitu (Cholih,2007):

- i. Jika  $LQ > 1$  maka sektor tersebut dikategorikan sektor basis, artinya tingkat spesialisasi kabupaten/kota lebih tinggi dari tingkat provinsi. Dan merupakan kegiatan ekonomi yang mampu melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah.
- ii. Jika  $LQ = 1$  maka tingkat spesialisasi kabupaten/kota sama dengan di tingkat provinsi. Dan merupakan kegiatan ekonomi yang hanya mampu melayani pasar di daerah itu sendiri.
- iii. Jika  $LQ < 1$  maka sektor tersebut dikategorikan sektor non basis, artinya tingkat spesialisasi kabupaten/kota lebih rendah dari tingkat provinsi. Dan merupakan kegiatan ekonomi yang kurang mampu melayani pasar di daerah itu sendiri.

Kemudian, intersepsi hasil Analisis *Location Quotient* tenaga kerja adalah sebagai berikut (Darman, 2016) :

- i. Jika  $LQ > 1$  berarti bahwa penyerapan tenaga kerja sektor i di tingkat kabupaten/kota lebih besar di bandingkan dengan penyerapan tenaga lapangan kerja untuk sektor yang sama di tingkat provinsi. Artinya penyerapan tenaga kerja sektor i di tingkat kabupaten/kota melebihi porsi penyerapan tenaga kerja sektor i di tingkat provinsi.
- ii. Jika  $LQ = 1$  berarti bahwa penyerapan tenaga kerja sektor i di tingkat kabupaten/kota sama dengan penyerapan tenaga kerja sektor i di tingkat provinsi.
- iii. Jika  $LQ < 1$  berarti bahwa penyerapan tenaga kerja sektor i di tingkat kabupaten/kota lebih kecil di bandingkan dengan penyerapan tenaga lapangan kerja untuk sektor yang sama di tingkat provinsi. Artinya penyerapan tenaga kerja sektor i di tingkat kabupaten/kota kurang dari porsi penyerapan tenaga kerja sektor i di tingkat provinsi.

Selain menggunakan Analisis LQ, Penelitian ini juga menggunakan Analisis Ketimpangan Pendapatan Sektor Basis dengan menggunakan Indeks Wiliamson Sektorial yang telah dimodifikasi oleh penulis. Dimana hasil dari Indeks Wiliamson Sektorial tersebut akan menggambarkan Ketimpangan Pendapatan pada Sektor tertentu saja, bukan ketimpangan secara umum. Berikut Rumusannya :

$$CVW_x = \frac{\sqrt{\sum (Y_{xi} - \bar{Y}_x)^2 \frac{f_{xi}}{n_x}}}{\bar{Y}_x}$$

dimana :

- $CVW_x$  = Ketimpangan Pendapatan Sektor x
- $Y_{xi}$  = PDRB Per Kapita Sektor x Kabupaten/Kota i
- $\bar{Y}_x$  = Rata-rata PDRB Per Kapita Sektor x Provinsi
- $f_{xi}$  = Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor x Kabupaten/Kota i
- $n_x$  = Jumlah Penduduk yang Bekerja di Sektor x Provinsi

Batasan tingkat ketimpangan antar wilayah dengan menggunakan ukuran ini, yaitu:

- Bila  $CVwx < 0,3$  artinya ketimpangan wilayah rendah
- Bila  $CVwx 0,3 - 0,5$  artinya ketimpangan wilayah sedang
- Bila  $CVwx > 0,5$  artinya ketimpangan wilayah tinggi.

## HASIL PENELITIAN

Hasil perhitungan nilai LQ diseluruh sektor perekonomian dengan pendekatan pendapatan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 terdapat 3 sektor yang menjadi sektor basis dalam perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada tahun 2010-2017 yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Jasa-jasa. Dimana sektor basis tersebut ditunjukkan dengan nilai tengah LQ lebih besar dari 1 (Satu), hal ini menandakan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki peranan yang besar dalam kegiatan ekspor daerah dan memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Kemudian berdasarkan perhitungan LQ di 9 sektor perekonomian dengan pendekatan tenaga kerja berdasarkan jumlah penduduk yang bekerja di atas usia 15 tahun, hanya terdapat 1 sektor ekonomi saja yang menjadi sektor basis perekonomian di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Riau pada tahun 2010-2017 yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Hal ini menandakan bahwa hanya Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Riau.

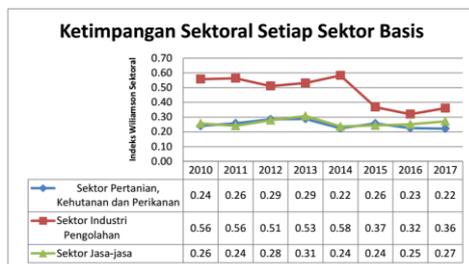
2 sektor lain yang sebelumnya basis berdasarkan Analisis LQ dengan pendekatan pendapatan, namun tidak basis pada Analisis LQ dengan pendekatan tenaga kerja. Hal tersebut menandakan kedua sektor basis ini merupakan sektor unggulan dan berperan besar dalam perekonomian namun belum maksimal dalam menyerap tenaga kerja di sebagian besar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Dan hal tersebut juga menandakan bahwa tenaga kerja dari kedua sektor tersebut di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Riau tidak memiliki daya saing.

### **Ketimpangan pendapatan sektoral setiap sektor basis antar kabupaten/kota di Provinsi Riau**

Telah didapat 3 sektor basis dengan pendekatan pendapatan dan 1 sektor basis dengan pendekatan tenaga kerja yang diperoleh dari Analisis *Location Quotient* (LQ) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Jasa-

jasa. Maka selanjutnya adalah mencari tahu bagaimana ketimpangan pendapatan sektoral antar kabupaten/kota dari ketiga sektor basis tersebut dengan menggunakan rumusan Analisis Indeks Wilimason Sektoral (CVwx) yang telah dimodifikasi oleh penulis. Dengan rumusan tersebut maka akan dapat diketahui ketimpangan pendapatan sektoral dari setiap sektor basis antar Kabupaten/Kota di Riau setiap tahunnya.

**Grafik 1**  
**Ketimpangan pendapatan sektoral**  
**setiap sektor basis antar**  
**kabupaten/kota di Provinsi Riau**  
**tahun 2010-2017**



**Sumber :** Diolah dari PDRB ADHK 2010 dan Jumlah Penduduk yang bekerja di 9 sektor setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2010-2017

Didapatlah hasil perhitungan Indeks Wiliamson Sektoral (CVwx) tersebut yang dapat dilihat melalui Grafik 5.1 diatas, dimana ketimpangan pendapatan sektoral setiap sektor basis antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Kemudian, jika dilihat dari rata-rata ketimpangan dari setiap sektor basis, maka sektor basis yang memiliki rata-rata ketimpangan pendapatan dengan kategori rendah adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

dan Sektor jasa-jasa yaitu sebesar 0,25 dan 0,26. Hal tersebut menandakan bahwa Pembangunan pada kedua sektor tersebut cukup merata antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Kemudian sektor basis yang memiliki rata-rata ketimpangan pendapatan dengan kategori sedang adalah Sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 0,47. Hal tersebut menandakan pembangunan Sektor Industri Pengolahan ini belum cukup merata antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Namun begitu, jika dilihat penurunan ketimpangannya Sektor Basis Industri Pengolahan begitu besar jika dibandingkan dengan sektor basis lainnya.

## PEMBAHASAN

### Analisis Sektor Ekonomi Basis

Berdasarkan *Analisis Location Quotient* diseluruh sektor perekonomian dengan pendekatan pendapatan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 terdapat 3 sektor yang menjadi sektor basis perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Riau pada tahun 2010-2017 yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Jasa-jasa. Hal ini berarti bahwa sektor-sektor tersebut memiliki peranan yang besar dalam kegiatan ekspor daerah dan memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Kemudian berdasarkan perhitungan LQ di 9 sektor perekonomian dengan pendekatan tenaga kerja berdasarkan jumlah

penduduk yang bekerja di atas usia 15 tahun, hanya terdapat 1 sektor ekonomi saja yang menjadi sektor basis perekonomian di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada tahun 2010-2017 yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Hal ini menandakan bahwa hanya Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang paling besar menyerap tenaga kerja dan hanya tenaga kerja dari Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan saja yang memiliki daya saing di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

### **Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan**

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor basis berdasarkan Analisis *Location Quotient* dengan pendekatan pendapatan dan pendekatan tenaga kerja. Hal ini menandakan bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan selain berperan besar dalam perekonomian dan mendorong ekspor daerah juga dominan dalam menyerap tenaga kerja di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Dimana hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darman (2016), yang menemukan bahwa Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor basis dengan pendekatan pendapatan maupun tenaga kerja, hal tersebut menandakan sektor ini selain berdaya saing juga dominan dalam penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

### **Sektor Industri Pengolahan**

Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor basis berdasarkan Analisis *Location Quotient* pendekatan pendapatan namun tidak untuk pendekatan tenaga kerja, maka hal tersebut menandakan bahwa Sektor Industri Pengolahan berperan besar dalam perekonomian dan ekspor daerah namun belum maksimal dalam penyerapan tenaga kerja yang ada di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Dan hal tersebut juga menandakan bahwa tenaga kerja Sektor Industri Pengolahan di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tidak memiliki daya saing, sehingga untuk memenuhi tenaga kerja di sektor ini di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau didatangkan dari luar wilayah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ibrahim (2018), yang mengungkapkan bahwa Sektor Industri Pengolahan justru menjadi sektor basis berdasarkan pendekatan pendapatan dan tenaga kerja di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Dimana hal tersebut menandakan bahwa selain berperan besar dalam perekonomian dan mendorong ekspor daerah, sektor ini juga dominan dalam penyerapan tenaga kerja di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

### **Sektor Jasa-jasa**

Berdasarkan perhitungan Analisis LQ dengan pendekatan pendapatan Sektor jasa merupakan sektor basis di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Namun berdasarkan Analisis LQ

dengan pendekatan tenaga kerja sektor ini tidak basis di sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Riau. Maka hal tersebut menandakan bahwa Sektor Jasa-jasa berperan besar dalam perekonomian daerah namun belum maksimal dalam menyerap tenaga kerja di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Dan hal tersebut juga menandakan tenaga kerja di Sektor Jasa-jasa di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau tidak memiliki daya saing, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor ini di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau didatangkan dari luar wilayah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Darman (2018), dimana berdasarkan hasil penelitiannya Sektor Jasa-jasa justru menjadi sektor basis dengan pendekatan pendapatan dan tenaga kerja. Dimana hal tersebut menandakan bahwa selain berperan dalam perekonomian dan memenuhi kebutuhan daerah, Sektor Jasa-jasa juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan hal tersebut juga menandakan tenaga kerja di Sektor Jasa-jasa di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki daya saing sehingga tidak perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar wilayah.

#### **Ketimpangan Pendapatan Sektorial dari Sektor Basis Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**

Output/PDRB dan jumlah penduduk yang bekerja pada Sektor Basis Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada Kabupaten/Kota di

Provinsi Riau dari tahun 2010 sampai 2017 cenderung mengalami pertumbuhan.

Kemudian ketimpangan pendapatan sektoral pada Sektor Basis Pertanian, Kehutanan dan Perikanan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dari tahun 2010 sampai 2017 trendnya cenderung menurun. Dari hal tersebut bisa dilihat Peranan Sektor Basis Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap ketimpangan pendapatan sektoral, dimana jika output/PDRB dan jumlah penduduk yang bekerja pada sektor Basis Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami pertumbuhan maka ketimpangan pendapatan sektoral dari Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau akan mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu berjudul “Pengaruh Transformasi struktural pertanian terhadap kemiskinan dan ketimpangan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun 1980-2014” yang dilakukan oleh Ifa dan Muttaqien (2018), dimana penelitian yang mereka lakukan memberikan hasil bahwa pertumbuhan Output/PDRB pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan namun tidak diiringin oleh pertumbuhan pada jumlah penduduk yang bekerja pada sektor ini, maka hal tersebut justru menyebabkan semakin besarnya ketimpangan pendapatan yang terjadi antar Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 1980 sampai 2014.

Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu berjudul “Peran Sektor Pertanian dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di wilayah Papua

sebelum dan sesudah otonomi khusus” yang dilakukan oleh Sadiyah dan Irham (2016), dimana penelitian tersebut memberikan hasil bahwa Pertumbuhan Output/PDRB pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kemudian diiringi oleh pertumbuhan pada jumlah penduduk yang bekerja pada sektor ini, maka hal tersebut menyebabkan ketimpangan pendapatan di Wilayah Papuan berkurang.

### **Ketimpangan pendapatan sektoral dari Sektor Basis Industri Pengolahan**

Output/PDRB dan jumlah penduduk yang bekerja pada Sektor Basis Industri Pengolahan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dari tahun 2010 sampai 2017 cenderung mengalami pertumbuhan. Kemudian ketimpangan pendapatan sektoral dari Sektor Basis Industri pengolahan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dari tahun 2010 sampai 2017 memiliki trend menurun. Dari hal tersebut bisa dilihat Peranan Sektor Basis Industri Pengolahan terhadap ketimpangan pendapatan sektoral, dimana jika output/PDRB dan jumlah penduduk yang bekerja pada Sektor Industri pengolahan mengalami pertumbuhan maka ketimpangan pendapatan sektoral dari Sektor Basis Industri Pengolahan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau akan mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadilah (2017), dengan penelitian berjudul “Pengaruh Industri, Tenaga Kerja Industri dan PDRB Sektor Industri terhadap disparitas pendapatan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur”

memberikan hasil bahwa terjadi pertumbuhan output/PDRB Sektor Industri Pengolahan namun tidak diringin oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja pada sektor ini, maka hal tersebut justru menyebabkan semakin besarnya ketimpangan yang terjadi pada antar wilayah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012 sampai 2015.

Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suhartono (2007), dengan penelitian berjudul “Struktur Ekonomi, Kesempatan Kerja dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah” memberikan hasil bahwa Sektor Basis Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan baik dari output/PDRB dan jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh terhadap pengurangan ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2002 sampai 2006.

### **Ketimpangan Pendapatan Sektoral dari Sektor Jasa-jasa**

Output dan jumlah penduduk yang bekerja pada Sektor Basis Jasa-jasa pada kabupaten/kota di Provinsi Riau dari tahun 2010 sampai 2017 cenderung mengalami pertumbuhan. Kemudian ketimpangan pendapatan sektoral pada Sektor Jasa-jasa antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dari tahun 2010 sampai 2017 memiliki trend menurun yang begitu kecil. Dari hal tersebut bisa dilihat Peranan Sektor Basis Jasa-jasa terhadap ketimpangan pendapatan sektoral, dimana jika output/PDRB dan jumlah penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan maka ketimpangan pendapatan sektoral dari Sektor Jasa-jasa antar Kabupaten/Kota di

Provinsi Riau akan mengalami penurunan yang begitu kecil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadilah (2017), dengan penelitian berjudul “Struktur Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah” memberikan hasil bahwa terjadi pertumbuhan output/PDRB dan jumlah penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa, maka hal tersebut menyebabkan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan yang begitu kecil.

Kemudian Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suhartono (2007), dengan penelitian berjudul “Struktur Ekonomi, Kesempatan Kerja dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah” memberikan hasil bahwa Sektor Basis Jasa-jasa mengalami pertumbuhan baik dari output/PDRB dan jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh terhadap pengurangan ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2002 sampai 2006.

**Tabel 3**  
**Sektor basis, Location Quotient dan Indeks Wiliamson Sektoral**

No	Sektor Basis	LQ Pendekatan Pendapatan		LQ Pendekatan Tenaga Kerja		Indeks Wiliamson Sektoral	
		Median	Ket	Median	Ket	Rata-rata	Ket
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.282	Basis	1.239	Basis	0.25	Rendah
2	Jasa-jasa	1.014	Basis	0.905	Non	0.26	Rendah
3	Industri Pengolahan	1.003	Basis	0.855	Non	0.47	Sedang

**Sumber :** Diolah dari PDRB ADHK 2010 dan Jumlah Penduduk yang bekerja di 9 sektor setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2010-2017

Kemudian jika dilihat dari Tabel 3 diatas, maka dapat dianalisa bahwa semakin besar jarak antara Nilai tengah LQ pendekatan Pendapatan dengan Nilai tengah LQ pendekatan Tenaga Kerja maka akan semakin besar pula Indeks Wiliamson Sektora atau Ketimpangan Pendapatan Sektoral antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Dimana Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Sektor Jasa-jasa merupakan Sektor Basis dengan Ketimpangan Pendapatan Sektoral kategori rendah yaitu dengan Rata-rata Indeks Wiliamson Sektoral sebesar 0.25 dan 0.26. Kemudian Sektor Industri Pengolahan merupakan Sektor Basis dengan Ketimpangan Pendapatan Sektoral kategori sedang yaitu dengan Rata-rata Indeks Wiliamson Sektoral sebesar 0.47

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memperoleh beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Analisis sektor ekonomi basis dan peranannya terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2017”, yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis LQ, Kabupaten/Kota di Provinsi Riau memiliki 3 sektor ekonomi basis dengan pendekatan pendapatan, yakni Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Industri Pengolahan, dan Sektor Jasa-jasa. Kemudian berdasarkan Analisis LQ dengan pendekatan tenaga kerja hanya

didapat 1 sektor basis saja yakni Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Maka, sektor basis yang selain berperan besar dalam perekonomian dan ekspor daerah namun juga dominan dalam menyerap tenaga kerja adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

2. Berdasarkan hasil Analisis Indeks Williamson Sektor, sektor basis yang memiliki ketimpangan pendapatan sektoral rata-rata dengan kategori rendah adalah Sektor Pertanian dan Sektor Jasa yaitu sebesar 0,25 dan 0,26. Dan ketimpangan pendapatan sektoral rata-rata dengan kategori sedang adalah Sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 0,47.

#### **Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, maka penulis ajukan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan daya saing tenaga kerja pada Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Jasa-jasa di Provinsi Riau dengan cara mengarahkan pelatihan tenaga kerja pada kedua sektor ini. Sebab Sektor Industri Pengolahan dan Sektor jasa-jasa merupakan sektor unggulan dan berperan besar dalam perekonomian di sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau namun belum maksimal dalam menyerap tenaga kerja, sebab tenaga kerja pada kedua sektor ini tidak memiliki daya saing.
- b. Melakukan pemerataan pembangunan terutama pada sektor ekonomi basis yang memiliki ketimpangan

pendapatan sektoral paling tinggi yaitu Sektor Industri Pengolahan agar pembangunan sektor tersebut kedepannya lebih merata antar kabupaten/kota di Provinsi Riau.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baransano, Michael Albert.dkk. 2016. *Peranan Sektor Unggulan sebagai salah Satu Faktor dalam Mengurangi Ketimpangan Pembangunan Wilayah diProvinsi Papua Barat*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. No.2, Vol.27.
- BPS. 2017 *Produk Domestik Regional Bruto Riau Menurut Lapangan Usaha 2010 2017*”, BPS Provinsi Riau,
- Choliq, Sabana. 2007. Analisis Pengembangan Kota Pekalongan Sebagai Salah Tatu Kawasan Andaalan Di Jawa Tengah. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. 2015. *Statistik Perkebunan Indragiri Hilir Tahun 2014-2016*. Indragiri Hilir
- Direktorat Jendral Perkebunan. 2015. *Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2014 -2016*. Jakarta : Direktorat Jendral Perkebunan, Departemen Pertanian
- Ghalib, Rusli. 2005. Ekonomi Regional. Pustaka Ramadhan. Bandung. *Gresik*. Surabaya : Fakultas Ekonomi Unesa Surabaya

- Kuncoro, Haryo. 2002. Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 7 No. 1. Halaman 45-46.
- Nugraha, Aditya. 2013. *Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Priyarsono, DS., Sahara, dan Firdaus. 2007. *Ekonomi Regional*, Jakarta: Universitas Terbuka Rita
- Sjafrijal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Praninta Offset
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2008. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta
- Syafrina, Syari. 2015. *Peranan Sektor Pertanian dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Sumatera Utara*, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara
- Tadjoeddin, M. Z, et al. 2001. *Aspirasi Terhadap Ketidakmerataan: Disparitas Regional dan Konflik NVertikal*. Working Paper Serises No. 01/01-I, Policy Support for Suistanable Sosial Economy Recovery. UNSFIR Jakarta
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Todaro MP, Stephen CS. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta(ID): Erlangga.
- Todaro, M. P. dan S. C. Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Wijaya, Tony. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis; Teori dan Praktik* .Yogyakarta : Graha Ilmu